

Persepsi Terhadap Kepemimpinan Perempuan

Alimatus Sahrah

Fakultas Psikologi, Universitas Wangsa Manggala, Jogjakarta

Abstract. The aim of this research is to answer the question: whether a perception difference exist towards women leadership between male and female subjects, and whether such differences exist among 4 sex-role groups (androgyny, masculine, feminine, and undifferentiated). Subjects were high school teachers, and college students ($N = 104$; 50 males and 54 females) aged between 20-50 years, minimal high school educated. Data was gathered through questionnaires and the hypothesis was tested through 2-way ANOVA. Results reveal that both hypotheses were accepted. The difference in perception between men and women and perception difference amongst the 4 groups are discussed.

Key words: perception, women leadership, sex role

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan persepsi terhadap kepemimpinan perempuan antara subjek laki-laki dan perempuan, dan apakah di antara empat kelompok peran-seks (androgini, maskulin, feminin, dan tak-terbedakan) ada perbedaan persepsi terhadap kepemimpinan perempuan. Subjek penelitian adalah para guru SMU, dan mahasiswa, yang berusia antara 20 tahun sampai dengan 50 tahun, berpendidikan minimal sederajat SMU, keseluruhannya 104 orang (50 laki-laki dan 54 perempuan). Dengan menggunakan angket persepsi terhadap kepemimpinan perempuan dan angket peran seks, hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis ANOVA 2 jalan. Hasil-hasil menunjukkan bahwa kedua hipotesis penelitian dapat diterima. Didiskusikan persepsi antara subjek laki-laki dan perempuan dan perbedaan persepsi di antara keempat kelompok peran seks terhadap kepemimpinan perempuan.

Kata kunci: persepsi, kepemimpinan perempuan, peran seks

Kepemimpinan adalah suatu hal penting dan utama dalam pembahasan mengenai kemajuan suatu kelompok, organisasi, atau bangsa dan negara. Dari tangan pemimpin itulah suatu kelompok, organisasi atau bangsa akan terlihat arah, dinamika dan kemajuan-kemajuan yang dihasilkannya. Ketika tampuk kepemimpinan itu jatuh di tangan perempuan yang dalam catatan selalu dianggap secara tradisional merupakan manusia kelas dua, mulailah hal itu menjadi pro dan kontra.

Secara *de jure* memang telah ditetapkan bahwa tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, dan ditegaskan lagi pada Garis-garis Besar Haluan Negara 1993. Untuk meyakinkan tekad inipun pemerintah Indonesia telah pula mengukuhkan konvensi PBB tahun 1952 tentang hak-hak politik perempuan dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dengan